

## Pengaruh Kebijakan Peraturan Suatu Negara Dalam Implementasi Multinasional Capital Budgeting

Lia Nirawati<sup>1</sup>, Annisa Cindy Maurina<sup>2</sup>, Iasa Nur Firdausi<sup>3</sup>, Ilham Asta Pangestu<sup>4</sup>,  
Mohammad Vavian Baharudinsyah<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
[20042010083@student.upnjatim.ac.id](mailto:20042010083@student.upnjatim.ac.id)

### ABSTRACT

*This journal examines the Influence of a Country's Regulatory Policy in the Implementation of Multinational Capital Budgeting with the aim that writers and readers know what influence a state regulation can have in the implementation of multinational capital budgeting. In compiling this journal the author uses descriptive qualitative research methods where research references are taken from written notes, typed interview transcripts, and video or audio recordings containing related information. Meanwhile, the data collection technique used by the researcher is by using various references from previous studies, books, and the internet. The main result of this study is the evidence that capital budgeting for domestic companies in Kenya differs significantly from the structure adopted by multinational companies operating in the country. In this journal, the authors argue that differences in capital budgeting border on capital-intensive and host country laws. Due to different operating policies around the world, subsidiaries of multinational companies adopt unique capital budgeting techniques to reflect the regulatory policies of the host country. In addition, the net present value guides how MNCs determine their capital budgets as each business entity's objective is to remain afloat and competitive.*

**Keywords :** *policies, regulations, multinational, capital budgeting.*

### ABSTRAK

Jurnal ini meneliti dan mengkaji Pengaruh Kebijakan Peraturan Suatu Negara dalam Implementasi Multinasional Capital Budgeting dengan tujuan agar penulis dan pembaca mengetahui pengaruh apa saja yang dapat diberikan suatu peraturan negara dalam pengimplementasian multinasional capital budgeting. Dalam menyusun jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana referensi penelitian diambil dari catatan tertulis, transkrip wawancara yang diketik, dan rekaman video atau audio yang berisi informasi terkait. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan berbagai referensi dari penelitian terdahulu, buku, dan internet. Adapun hasil utama yang didapatkan dalam penelitian ini adalah dibuktikannya bahwa penganggaran modal untuk perusahaan domestik di Kenya berbeda secara signifikan dari struktur yang diadopsi oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di negara tersebut. Dalam jurnal ini, penulis berpendapat bahwa perbedaan dalam penganggaran modal berbatasan dengan intensif modal dan hukum negara tuan rumah. Karena kebijakan operasi yang berbeda di seluruh dunia, anak perusahaan multinasional mengadopsi teknik penganggaran modal yang unik untuk mencerminkan kebijakan peraturan negara tuan rumah. Selain itu, nilai sekarang bersih memandu bagaimana MNC menentukan anggaran modal mereka karena tujuan setiap entitas bisnis tetap bertahan dan kompetitif.

**Kata kunci :** *kebijakan, peraturan, multinasional, penganggaran modal.*

### PENDAHULUAN

Literatur bisnis internasional penuh dengan informasi tentang penganggaran modal oleh perusahaan multinasional karena mereka beroperasi di lokasi geografis

yang berbeda yang memiliki peraturan yang berbeda dalam kaitannya dengan perpajakan, hak asasi manusia, akses ke sumber daya alam, di antara faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan multinasional di negara tuan rumah ( O'Brien, 2019). Dengan meningkatnya globalisasi dan liberalisasi pasar, ada peningkatan dalam bisnis internasional, menandakan bahwa perusahaan harus menganggarkan modal mereka dengan cara yang sehat dengan maksud untuk mewujudkan tujuan dan proyeksi yang ditetapkan. Penganggaran modal mengacu pada alokasi sumber daya organisasi yang langka dengan maksud untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas ( Iachan , 2020 ; Batra & Verma, 2017) . Pendekatan penganggaran yang digunakan oleh perusahaan multinasional unik dibandingkan dengan perusahaan domestik karena melampaui batas perusahaan induk untuk mempertimbangkan lokasi anak perusahaan di pasar luar negeri. Tujuannya adalah untuk mengalokasikan sumber daya dengan cara yang efisien sehingga tujuan / sasaran organisasi tercapai dalam batas-batas sumber daya yang tersedia ( O'Brien, 2019 ; Su , Lee, Chou, Yeh, & Thi , 2018) . Dengan latar belakang ini, makalah ini menyelidiki perbedaan penganggaran modal antara perusahaan domestik dan perusahaan multinasional di Kenya.

#### **Perbedaan Penganggaran Modal**

Badan literatur akademis saat ini telah memberikan perbedaan eksplisit antara penganggaran modal untuk perusahaan domestik dan perusahaan multinasional, di mana terlihat konsensus di antara para sarjana bahwa Net Present Value (NPV), perpajakan, risiko pengambilalihan, struktur kepemilikan, risiko lingkaran bisnis, dan perkiraan nilai tukar ( Brunzell , Liljeblom, & Vaihekoski , 2013 ; Ma a ji, & Barnett, 2019). Berdasarkan lingkungan operasi, perusahaan multinasional mengadopsi berbagai pendekatan untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien karena sumber daya organisasi adalah prediktor utama kinerja perusahaan ( Batra & Verma, 2017) . Makalah ini menggunakan kasus Bharti Airtel , Safaricom PLC, Unilever Inc., dan Del monte Kenya terbatas.

#### **Nilai Sekarang Bersih (NPV)**

Penelitian bisnis internasional telah berkonsentrasi pada penganggaran modal oleh perusahaan internasional dan nasional karena keduanya menggunakan tolok ukur yang berbeda dalam mendamaikan anggaran mereka ( Kamau, Rotich, & Anyango, 2017). Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang telah beroperasi lebih lama cenderung mengadopsi pendekatan NPV ( Brunzell et al., 2013). Penting untuk dicatat bahwa NPV mengacu pada arus kas masuk yang berlaku dan nilai sekarang dari arus kas keluar selama periode tertentu ( Adusumilli , Davis, & Fromme , 2016) . Bukti ini tampaknya menunjukkan bahwa perusahaan multinasional lebih terikat untuk menggunakan NPV untuk pembiayaan modal karena mereka beroperasi di banyak lokasi geografis. Selain itu, perusahaan multinasional menggunakan net present value karena memiliki pengeluaran modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan domestik. Untuk mendukung temuan ini, Ma a ji dan Barnett

(2019) menegaskan bahwa perusahaan multinasional Kamboja menggunakan NPV karena mereka memiliki jumlah investasi modal yang lebih tinggi

Misalnya, harimau telekomunikasi India, Bharti Airtel menggunakan NPV untuk menentukan apakah operasi mereka di Kenya menguntungkan atau tidak, sementara Safaricom tidak menggunakan teknik tersebut karena merupakan perusahaan telekomunikasi domestik yang dapat memanfaatkan determinan lain dari penganggaran modal ( Pouryeganeh , 2014) . Ini menunjukkan bahwa meskipun Safaricom PLC adalah pemimpin pasar di Kenya, Safaricom secara substansial memanfaatkan teknik penganggaran modal lainnya, seperti arus kas yang didiskontokan. Pada catatan yang sama, Unilever dan Del monte Kenya menggunakan cara penganggaran modal yang berbeda, di mana Unilever menerapkan NPV untuk menetapkan arti-penting proyek, sedangkan yang terakhir menggunakan risiko lingkaran bisnis untuk mengalokasikan sumber daya. Untuk tujuan ini, terbukti bahwa perusahaan multinasional memanfaatkan NPV karena proyek mereka padat modal dan tersebar di banyak lokasi geografis yang memiliki kondisi pasar yang unik.

### **Perpajakan**

Ada banyak sekali literatur akademis tentang bagaimana rezim pajak mendikte kinerja perusahaan bisnis. Misalnya, penelitian tentang penganggaran modal organisasi menunjukkan bahwa perusahaan multinasional menggunakan pendekatan yang berbeda dari perusahaan lokal karena ada kecenderungan perusahaan domestik untuk menikmati tax holiday dan peraturan proteksionis bisnis lainnya ( Liang, 2017). Untuk menambah argumen, makalah ini mengutip karya Howard (2019) yang melakukan studi tentang efektivitas pengurangan tarif pajak perusahaan Irlandia dan menemukan bahwa penurunan pajak perusahaan mendorong industrialisasi karena pendekatan ini meningkatkan Investasi Langsung Asing. Untuk tujuan ini, penting untuk dicatat bahwa rezim pajak yang menindas akan mencegah perusahaan multinasional untuk berinvestasi di negara tertentu karena beberapa negara memiliki pajak yang tinggi. Sebagai contoh, bukti menunjukkan bahwa negara-negara Afrika memiliki salah satu tarif pajak tertinggi di negara tersebut, yaitu standar setinggi 30% ( Jahnsen & Pomerleau, 2017) .

Pajak yang tinggi di negara-negara, seperti Kenya, berarti penganggaran modal oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di negara tersebut, seperti Bharti Airtel, harus mempertimbangkan pajak perusahaan ( Ngari , 2016). Statistik menunjukkan bahwa kerugian Airtel dalam tiga E ast seorangfrican Negara -negara komunitas mencapai \$46,5 juta pada tahun 2019 (The East African, 2019). Terbukti, ini menunjukkan bahwa pajak perusahaan yang tinggi menentukan penganggaran modal karena banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di Kenya dan bahkan di Afrika, membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai titik impas. Tarif pajak perusahaan di Kenya untuk bentuk usaha tetap adalah sebesar 30% dari laba bersih yang disesuaikan, sedangkan bentuk usaha tetap non-penduduk adalah sebesar 37,5% dari pendapatan bisnis ( Abdul & McFie , 2020). Bukti ini menunjukkan bahwa Bharti Airtel membayar keuntungannya yang tinggi (37,5%), sementara Safaricom PLC

membayar 30,7%. Terbukti, kedua perusahaan membuat anggaran modal yang berbeda karena tarif perpajakan.

### **Risiko Pengambilalihan**

Para sarjana yang berfokus pada bisnis internasional telah memberikan bukti lengkap tentang bagaimana risiko pengambilalihan menentukan penganggaran modal. Misalnya, Akhtaruzzaman, Berg, dan Hajzler (2017) menunjukkan bahwa perusahaan multinasional yang tidak memanfaatkan koneksi politik tidak mungkin bersaing secara adil dengan mereka yang melakukannya. Artinya, sebagian besar perusahaan multinasional berkomplot dengan elit politik untuk mengatur operasinya di negara berkembang, seperti Kenya karena tidak memenuhi semua persyaratan industri. Indeks risiko pengambilalihan (1 = rendah, 7 = tinggi) menempatkan Kenya di nomor 73, dengan skor 4 (Akhtaruzzaman, 2019). Bukti ini menunjukkan bahwa perusahaan multinasional yang beroperasi di Kenya cenderung menyesuaikan anggaran mereka dengan tujuan untuk menurunkan risiko, seperti yang diakibatkan oleh politik.

Misalnya, ada tindakan diskriminatif yang dilakukan pemerintah, yang menghambat kemampuan perusahaan multinasional untuk berkembang. Misalnya, Del Monte dan Unilever menjalani peraturan yang berbeda karena perusahaan lokal didukung melalui zona pemrosesan ekspor dan pembangunan infrastruktur lainnya termasuk jalan dan listrik. Dengan demikian, risiko pengambilalihan memaksa banyak perusahaan multinasional untuk menyusun anggaran modal mereka dengan cara yang mencerminkan risiko di negara tuan rumah. Misalnya, perusahaan multinasional di Kenya akan memiliki struktur penganggaran modal yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara, seperti Afghanistan, Suriah, dan Republik Afrika Tengah karena risiko pengambilalihan yang lebih tinggi di negara-negara ini.

### **Perkiraan Nilai Tukar**

Dalam lingkungan bisnis kontemporer, fluktuasi nilai tukar tidak dapat dihindari karena perusahaan beroperasi di lingkungan bisnis yang bergejolak ditambah dengan paritas daya beli protean (Kunze, 2020). Dengan demikian, perusahaan domestik akan menyusun anggaran modal mereka secara berbeda karena perubahan nilai tukar mungkin tidak mempengaruhi mereka karena mereka menggunakan mata uang lokal untuk membiayai anggaran mereka. Di sisi lain, perusahaan multinasional harus mempertimbangkan nilai tukar yang selalu berubah, di mana perusahaan-perusahaan ini menggunakan mata uang yang berbeda dibandingkan dengan shilling Kenya. Misalnya, saat ini perdagangan shilling terhadap dolar di Kshs . 104, artinya jika nilai tukar ini berfluktuasi menjadi \$1 yang ditukar dengan Kshs . 90 dapat mempengaruhi nasib perusahaan multinasional. Bukti ini menunjukkan bahwa nilai tukar adalah salah satu perbedaan utama yang menggambarkan bagaimana perusahaan multinasional dan domestik menyusun anggaran modal mereka

Dari argumen di atas, jelas bahwa Bharti Airtel akan memeriksa nilai tukar di Kenya sebelum memulai proyek ekspansi tertentu, sementara Safaricom mungkin tidak terlalu mempertimbangkan nilai tukar karena sebagian besar aktivitas dilakukan menggunakan mata uang lokal yang mungkin tidak banyak terpengaruh oleh perubahan. dalam nilai tukar. Penting untuk dicatat bahwa NPV terkait erat dengan nilai tukar karena fluktuasi nilai tukar memiliki potensi untuk mempengaruhi hasil sejauh mana suatu proyek dapat mencapai titik impas dari perspektif nilai sekarang bersih ( Farkas, 2017) . Sederhananya, investasi oleh perusahaan multinasional mempertimbangkan inflasi dan opsi pembiayaan, yang berarti bahwa pembayaran kembali pinjaman mungkin perlu dianalisis dari perspektif nilai tukar.

### **Pembatasan Transfer Dana**

Ada bukti literatur kebijakan dan akademis, yang menunjukkan sejauh mana negara tuan rumah membatasi transfer dana oleh perusahaan multinasional ke perusahaan induk. Guvenen, Mataloni Jr, Rassier, dan Ruhl (2017) mengamati bahwa sebagian besar negara di dunia memiliki pembatasan repatriasi keuntungan dan/atau transfer dana ke perusahaan induk atau ke anak perusahaan di luar negara tuan rumah, di mana perusahaan-perusahaan ini diharapkan hukum setempat untuk menginvestasikan kembali sumber daya mereka di dalam negara atau mentransfer keuntungan setelah jangka waktu tertentu. Misalnya, karena Safaricom PLC adalah pasar domestik, ada lebih sedikit batasan tentang bagaimana negara menyusun anggaran modalnya, sementara Bharti Airtel memiliki kewajiban perusahaan untuk menginvestasikan kembali dana dan/atau keuntungan di dalam negeri ( Madise, 2019).

Perusahaan multinasional terus merespon secara berbeda terhadap pembatasan repatriasi tunai, seperti pelaporan kinerja yang kurang dengan maksud untuk menghindari undang-undang negara yang membatasi ( Johnson, 2016). Ini menyiratkan bahwa penganggaran modal perusahaan multinasional mencerminkan hukum anak perusahaan mereka. Misalnya, Bharti Airtel dan Unilever memiliki investasi yang signifikan di Afrika, namun perusahaan-perusahaan ini menyusun anggaran modal mereka dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang unik di negara tuan rumah.

### **Nilai Sisa**

Sebagian besar MNC di seluruh dunia mengalokasikan sumber daya dengan cara yang mencerminkan lingkungan bisnis negara tuan rumah. Ini menyiratkan bahwa ketika perusahaan multinasional berinvestasi di pasar yang tidak terduga, seperti industri telekomunikasi dan manufaktur, mereka menganggarkan modal mereka dengan maksud untuk menutupi nilai sisa yang tidak pasti ( Nguyen, 2019) . Misalnya, Bharti Airtel mengakuisisi aset saham Essar di Y uMobile, yang berarti bahwa perusahaan berinvestasi di pasar luar negeri dengan pengetahuan dan/atau informasi yang memadai tentang apa yang mereka selamatkan jika mereka tutup.

Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan multinasional menggunakan nilai sisa yang tidak pasti untuk menghitung nilai penyusutan.

#### **KESIMPULAN**

Jelas penganggaran modal untuk perusahaan domestik di Kenya berbeda secara signifikan dari struktur yang diadopsi oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di negara tersebut. Makalah ini berpendapat bahwa perbedaan dalam penganggaran modal berbatasan dengan intensif modal dan hukum negara tuan rumah. Karena kebijakan operasi yang berbeda di seluruh dunia, anak perusahaan perusahaan multinasional mengadopsi teknik penganggaran modal yang unik untuk mencerminkan kebijakan peraturan negara tuan rumah. Selain itu, nilai sekarang bersih memandu bagaimana MNC menentukan anggaran modal mereka karena tujuan setiap entitas bisnis tetap bertahan dan kompetitif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul, F., & McFie, J. B. (2020). Tax Complexity and Compliance Behaviour of Large and Medium Sized Business Tax Payers in Kenya. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 9(2), 90-106.
- Brunzell, T., Liljebloom, E., & Vaihekoski, M. (2013). Determinants of capital budgeting methods and hurdle rates in Nordic firms. *Accounting & Finance*, 53(1), 85-110.
- Farkas, M. (2017). *Three Essays in Financial Economics* (Doctoral dissertation, Central European University Budapest, Hungary).
- Guvenen, F., Mataloni Jr, R. J., Rassier, D. G., & Ruhl, K. J. (2017). *Offshore profit shifting and domestic productivity measurement* (No. w23324). National Bureau of Economic Research.
- Howard, C. (2019). Ireland: A Study in the Effectiveness of Corporate Tax Rate Reduction. *Journal of Interdisciplinary Undergraduate Research*, 11(1), 3.